



KAJIAN INDIKATOR PENINGKATAN KUALITAS KONSUMSI PANGAN KABUPATEN BANDUNG

STUDY OF IMPROVEMENT INDICATORS FOOD CONSUMPTION QUALITY OF BANDUNG REGENCY

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
disperkimtan@bandungkab.go.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian indikator yang mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan di Kabupaten Bandung. Dengan metode deskriptif kualitatif, penulis mengidentifikasi indikator makro pembangunan Kabupaten Bandung, indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bandung, indikator kinerja daerah aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan sistem pangan berdasarkan *Food and Agricultural Organization*. Berdasarkan hasil analisis, indikator dalam RPJMD tersebut secara umum sudah sesuai dengan sistem pangan mulai dari sistem inti, elemen sosial dan elemen alam. Sistem inti terdiri atas produksi, agregasi/proses, distribusi serta konsumsi. Indikator RPJMD yang sesuai dengan lingkup produksi meliputi ketersediaan pangan utama, peningkatan produksi perikanan budidaya/ikan tangkap/olahan perikanan, peningkatan produksi komoditas sektor pertanian, peningkatan produksi ternak dan unggas, peningkatan status kesehatan hewan ternak dan kualitas kasmavet produk asal hewan. Lingkup agregasi dan proses terdiri atas indikator cadangan pangan/lumbung pangan, serta pemeriksaan produksi produk makanan/minuman industri rumah tangga. Indikator yang sesuai dengan lingkup distribusi meliputi distribusi perdagangan berkualitas/terkelola, ruas jalan termitigasi risiko kemacetan, keamanan pangan segar, serta pemeriksaan (*post market*) produksi produk makanan/minuman/industri rumah tangga. Adapun indikator yang sudah sesuai dengan lingkup konsumsi adalah rasio konsumsi beras, sayur dan buah terhadap total konsumsi ideal. Indikator dalam RPJMD tahun 2021-2026 Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan seluruh elemen sosial sistem pangan. Indikator dalam RPJMD tahun 2021-2026 juga sudah sesuai dengan kelima elemen alam sistem pangan.

Kata kunci: sistem pangan, sistem inti, elemen sosial, elemen alam,

Abstract

This study aims to see the suitability of indicators that support improving the quality of food consumption in Bandung Regency. Using a qualitative descriptive method, the authors identify macro indicators for the development of Bandung Regency, the main performance indicators for the Bandung Regency Government, regional performance indicators for aspects of community welfare and aspects of public services in the Bandung Regency RPJMD 2021-2026 which are in accordance with the food system based on the Food and Agricultural Organization. Based on the results of the analysis, the indicators in the RPJMD are generally in accordance with the food system starting from the core system, social elements and natural elements. The core system consists of production, aggregation/process, distribution and consumption. RPJMD indicators that are in accordance with the scope of production include the availability of primary food, increased production of aquaculture/captured fish/processed fishery, increased production of agricultural sector commodities, increased production of livestock and poultry, increased health status of livestock and quality of animal origin product cash flow. The scope of aggregation and process consists of indicators of food reserves/food storages, as well as examination of the production of food/beverage products for home industries. Indicators that are in accordance with the scope of distribution include the distribution of quality/managed trade, road segments mitigating the risk of congestion, fresh food



safety, and inspection (post market) of food/beverage/home industry product production. The indicator that is in accordance with the scope of consumption is the ideal ratio of consumption of rice, vegetables and fruit to total consumption. The indicators in the 2021-2026 RPJMD of Bandung Regency are in accordance with all the social elements of the food system. The indicators in the 2021-2026 RPJMD are also in accordance with the five natural elements of the food system.

Keywords: food system, core system, social elements, natural elements

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Tujuan pembangunan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberhasilan pembangunan nasional dapat tercapai dengan meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu sumber daya manusia yang memiliki fisik yang sehat, mental yang kuat, serta penguasaan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi menyebutkan bahwa dengan peningkatan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan komitmen global dan aset yang berharga bagi bangsa dan negara Indonesia. Perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan status gizi yang optimal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara berkomitmen melakukan perbaikan gizi secara berkelanjutan.

Masalah gizi dapat disebabkan oleh multidimensi seperti yang termuat dalam kerangka UNICEF tahun 1998, mulai dari penyebab langsung yaitu konsumsi pangan yang tidak memadai dan infeksi. Adapun penyebab tidak langsung mencakup ketersediaan pangan, pola asuh, ketersediaan air bersih, kesehatan lingkungan serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Penyebab mendasar dari faktor-faktor tersebut adalah ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan, pendidikan, kemiskinan, ekonomi, ideologi, politik, hingga sistem pemerintahan. Pengaturan tentang hal tersebut tercermin dari dokumen kebijakan pembangunan dan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perbaikan masalah gizi melalui perbaikan kualitas konsumsi pangan harus menjadi komitmen pemerintah daerah.

Urusan pangan menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung yang termuat dalam Misi Kelima Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2021-2026. Misi kelima Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2021-2026 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah dengan tujuan Meningkatkan ketahanan pangan daerah dan sasaran Menurunkan masalah pangan daerah serta indikator skor PPH konsumsi. Skor PPH konsumsi pangan yang merupakan indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2018 hingga 2021 tidak mencapai target dan trennya justru mengalami penurunan. Oleh karena itu diperlukan peninjauan pada dokumen RPJMD dan Renstra lintas OPD untuk melihat konvergensi program dan kegiatan yang mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan.

Sistem pangan mencakup seluruh jajaran pelaku dan aktivitas nilai tambah yang saling terkait dan terlibat dalam proses produksi, agregasi, pengolahan, distribusi, konsumsi dan pembuangan produk yang berasal dari pertanian, kehutanan, perikanan, serta merupakan bagian dari ekonomi, sosial, dan alam yang lebih luas. Sistem pangan merupakan inti dari

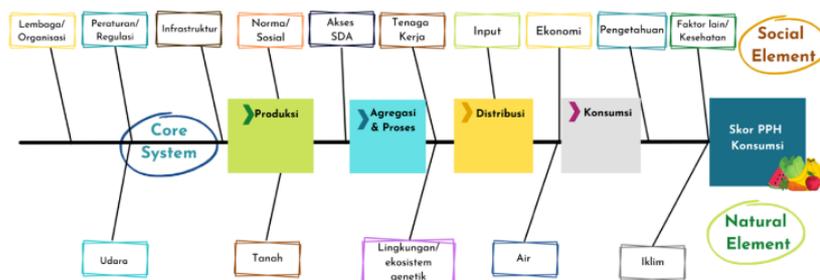


tujuan pembangunan berkelanjutan yang menyerukan transformasi dalam pertanian dan sistem pangan untuk mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan dan gizi. Melalui pendekatan sistem pangan, mengubah satu bagian pada sistem pangan dapat merubah seluruh sistem menuju kemudahan bagi penduduk dalam mengakses dan mempertahankan konsumsi pangan yang berkualitas. Melalui sistem pangan juga dapat diketahui keterkaitan secara eksplisit di seluruh lini yang berkaitan dengan produksi, agregasi, distribusi dan konsumsi pangan. Hal tersebut diperlukan untuk pengembangan kebijakan dan implementasi terkait perbaikan konsumsi pangan. Keterkaitan seluruh lini sistem pangan sangat kompleks sehingga memerlukan peran multisektor. Keterlibatan perangkat daerah multisektor diharapkan bisa menjadi solusi dalam upaya percepatan perbaikan konsumsi pangan khususnya di Kabupaten Bandung.

Rencana kerja perangkat daerah memuat indikator kinerja. Indikator merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact). Kualitas konsumsi pangan diukur dari skor PPH konsumsi yang juga merupakan indikator kinerja utama dalam RPJMD Kabupaten Bandung. Tujuan khusus dari kajian yang dilakukan adalah untuk menganalisis kesesuaian indikator dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021- 2026 yang mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Pengolahan data yang dilakukan pada penyusunan indikator ini diawali dengan mengidentifikasi indikator makro pembangunan Kabupaten Bandung, indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bandung, indikator kinerja daerah aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan sistem pangan berdasarkan Food and Agricultural Organization (FAO, 2018). Hasil identifikasi indikator yang mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan disajikan dalam bentuk diagram fishbone. Kerangka diagram fishbone dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka indikator yang mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan



C. TINJAUAN LITERATUR

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

Pasal 2 ayat (2):

Tujuan khusus Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi adalah:

- a. Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat
- b. Meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi, khususnya koordinasi antar sektor untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi; dan
- c. Memperkuat implementasi konsep program gizi yang bersifat langsung dan tidak langsung

Pasal 5: Gerakan nasional Percepatan Perbaikan Gizi diprioritaskan untuk perbaikan gizi pada seribu hari pertama kehidupan.

Pasal 6: Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a) kampanye nasional dan daerah; b) advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga; c) dialog untuk menggalang kerja sama dan kontribusi; d) pelatihan; e) diskusi; f) intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik); g) intervensi kegiatan gizi tidak langsung (sensitif); dan h) kegiatan lain.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 12 : Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 110 : Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.

Pasal 130 : Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja.

Pasal 180 : Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 269 : Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota mencakup rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota.



Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memuat aspek beserta indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan outcome Pemerintah Daerah, khususnya bidang pangan seperti yang dicantumkan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1. Aspek beserta indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan outcome Pemerintah Daerah

No	Bidang Urusan/ Indikator
Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
1	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)
2	Penguatan Cadangan Pangan
3	Penanganan daerah rawan pangan
Aspek Pelayanan Umum (Layanan Wajib Umum Non Dasar)	
1	Pangan
2	Ketersediaan pangan utama
3	Ketersediaan energi dan protein perkapita
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disusun secara sistematis meliputi: a. Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia

Pasal 3 : Untuk melakukan evaluasi, perencanaan konsumsi dan ketersediaan pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penduduk rata-rata secara makro nasional dan berbagai kebutuhan lainnya, dalam AKG ditetapkan estimasi rata-rata angka kecukupan energi dan rata-rata angka kecukupan protein bagi masyarakat Indonesia.

Pasal 5 : AKG digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk: menghitung kecukupan gizi penduduk di daerah; menyusun pedoman konsumsi pangan; mengembangkan indeks mutu konsumsi pangan; kebutuhan lainnya.

Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi 2020-2024

Prinsip Dasar Kebijakan Strategis

1. Keadilan

Prinsip keadilan dalam konteks ketahanan pangan dapat diartikan kesamaan hak semua warga masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan pangan yang sesuai bagi dirinya, baik secara kuantitas maupun kualitas.



2. Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Pembangunan ketahanan pangan dan gizi harus melibatkan peran serta masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya secara berkelanjutan.
3. Kedaulatan dan Stabilitas Nasional.
Dalam konteks ketahanan pangan kedaulatan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Stabilitas nasional adalah kestabilan atau situasi yang kondusif baik di bidang sosial budaya, politik, pemerintahan, keamanan, perekonomian, perdagangan, dan bidang-bidang lainnya, sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik, rakyat bisa melakukan aktivitasnya dengan baik, dan program-program serta kebijakan pemerintahan bisa dilaksanakan secara optimal.
4. Kemandirian
Terdapat 3 aspek dalam Kemandirian Pangan:
 - Produksi pangan yang beraneka-ragam dari dalam negeri
 - Menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai tingkat perseorangan
 - Memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal yaitu produksi pangan dalam negeri harus dimaksimalkan dengan melihat potensi yang ada.
5. Peran aktif para pihak
Pembangunan Ketahanan Pangan dan Gizi merupakan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan penanganan multidisiplin. Seluruh pemangku kepentingan di bidang pangan dan gizi yaitu pemerintah, pemerintah daerah, lembaga legislatif, pelaku usaha, filantropi, lembaga swadaya masyarakat, media, akademisi, lembaga pengkajian, komunitas madani di pusat dan daerah serta masyarakat harus berperan aktif dalam pembangunan pangan dan perbaikan gizi masyarakat.
6. Keamanan Pangan
Jaminan keamanan pangan harus diberikan mulai dari aspek produksi pangan, distribusi sampai dengan pemanfaatan pangan (*form farm to fork concept*).
7. Keberlanjutan (Aspek Kebijakan Strategis)
 - a. Ketersediaan Pangan
 - Meningkatkan Produksi Pangan yang Beragam
 - Memperkuat cadangan pangan untukantisipasi ancaman ketersediaan pangan
 - Menyediakan Pangan yang Aman
 - b. Keterjangkauan Pangan
 - Keterjangkauan Fisik
 - Keterjangkauan Ekonomi
 - Keterjangkauan Sosial
 - c. Pemanfaatan Pangan
 - Pemenuhan Kebutuhan Gizi
 - Memperkuat Sistem Surveilans Pangan dan Gizi
 - Jaminan Keamanan Pangan
 - d. Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi



- Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, pemerintah daerah, lembaga legislatif, pelaku usaha, filantropi, LSM, media, akademisi dan lembaga pengkajian serta komunitas madani di pusat dan daerah).

Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2021-2024

Strategi 1. Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan Bergizi dan Aman untuk Keluarga

Strategi 2. Penguatan Komunikasi Perubahan Perilaku untuk Peningkatan Pangan dan Gizi

Strategi 3. Perbaikan Komsumsi Gizi Keluarga

Strategi 4. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Pangan dan Gizi

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Konsumsi Pangan Kabupaten Bandung Tahun 2014-2020

Tingkat kecukupan konsumsi energi dan protein dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui konsumsi pangan masyarakat. Analisis konsumsi pangan penduduk Kabupaten Bandung mengacu pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII tahun 2004 yaitu Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 kkal/kapita/hari dan Angka Kecukupan Protein (AKP) 52 gr/kapita/hari. Acuan ini digunakan untuk analisis konsumsi hingga tahun 2021 karena target pada RPJMD 2016-2021 disusun menggunakan AKE dan AKP tersebut.

Pada dibawah ini disajikan perkembangan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan di Kabupaten Bandung tahun 2014-2020. Jika mengacu pada standar AKE 2.000 kkal/kap/hari dan AKP 52 gr/kap/hari maka konsumsi energi dan protein di Kabupaten Bandung sudah baik selama 7 tahun terakhir. Konsumsi energi paling tinggi terdapat pada tahun 2017 yaitu 2.347 kkal/kap/hari sedangkan konsumsi energi terendah terdapat pada tahun 2014 yaitu 1.917 kkal/kap/hari. Konsumsi protein tertinggi erdapat pada tahun 2017 yaitu 65,2 gr/kap/hari dan terendah pada tahun 2014 yaitu 53,5 gr/kap/hari. Rata-rata peningkatan konsumsi energi pada tahun 2014-2020 adalah 3% sedangkan peningkatan konsumsi protein adalah 3,2%.

Tabel 2. Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Kabupaten Bandung Tahun 2014-2020

No.	Tahun	Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	% AKE	Konsumsi Protein (gr/kap/hari)	% AKP
1	2014	1.917	95,9	53,5	102,9
2	2015	2.183	109,2	58,7	112,9
3	2016	2.321	116,1	62,1	119,4
4	2017	2.347	117,4	65,2	125,4
5	2018	2.193	109,6	61,8	118,9
6	2019	2.201	110	62,1	119,4
7	2020	2.082	104,1	59,2	113,8
Rata-Rata Laju (%)			3		3,2

AKE: 2,000 kkal/kap/hari



Selama 7 tahun terakhir, secara rata-rata skor PPH meningkat 2,3%. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata peningkatan skor PPH Provinsi yaitu 1,2%. Skor PPH yang telah mencapai ideal adalah padi-padian dan minyak lemak, adapun skor PPH umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, buah/biji berminyak, gula, dan sayur buah masih belum mencapai ideal. Pola ini selalu berulang dalam 7 tahun terakhir. Artinya, pola konsumsi pangan di Kabupaten Bandung cenderung tetap, yaitu kelebihan konsumsi beras, terigu dan minyak (produk gorengan), konsumsi pangan hewani perlu ditingkatkan sedikit lagi dan pangan lainnya (umbi, kacang, sayur buah) masih belum memadai konsumsinya.

Tabel 3. Perkembangan skor PPH Kabupaten Bandung Tahun 2014-2020

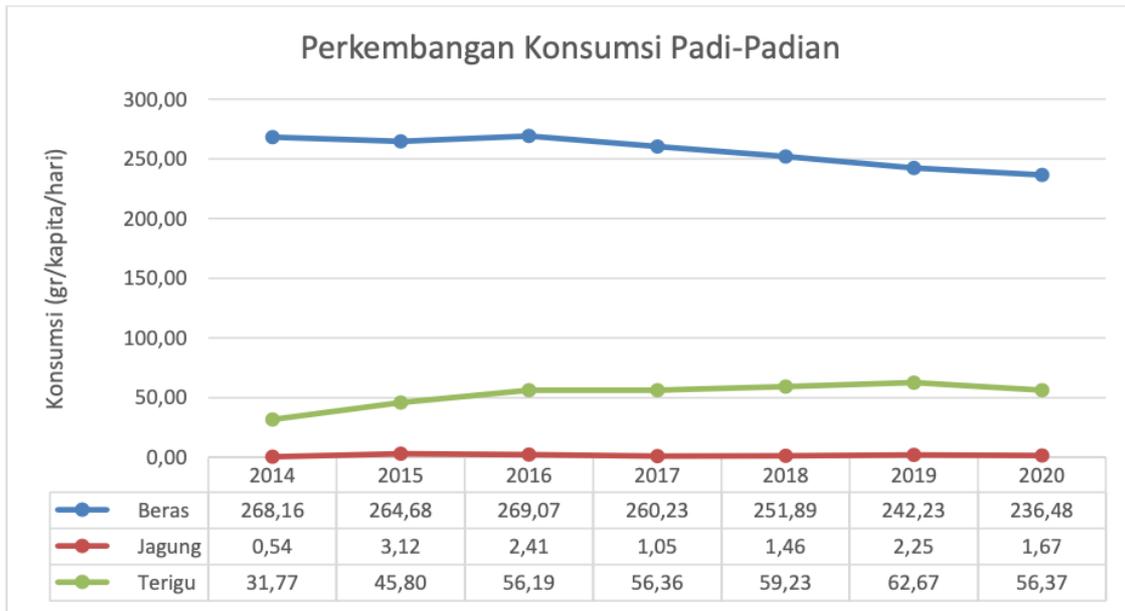
No.	Kelompok Pangan	Tahun							Skor Ideal
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	1,1	1,0	0,9	1,9	1,2	1,1	1,1	2,5
3	Pangan Hewani	16,8	21,3	21,4	24,0	23,3	23,5	23,2	24,0
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	0,2	0,3	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	1,0
6	Kacang-kacangan	5,6	5,0	5,7	6,6	6,0	6,4	5,9	10,0
7	Gula	1,3	1,8	2,0	2,1	1,2	1,2	1,1	2,5
8	Sayur dan Buah	15,3	19,2	18,9	19,7	21,8	21,0	18,9	30,0
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skor PPH Kabupaten Bandung*		70,4	78,6	79,3	84,6	83,6	83,3	80,3	100
Rata-Rata Laju (%)			11,6	0,9	6,7	-1,2	-0,3	-3,6	
Skor PPH Jawa Barat**		78,3	81,0	84,3	81,6	85,2	84,8	83,7	100
Rata-Rata Laju (%)			3,4	4,1	-3,2	4,4	-0,5	-1,3	

Sumber: Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Kabupaten Bandung 2019, kerjasama DKPP dengan CV MWA

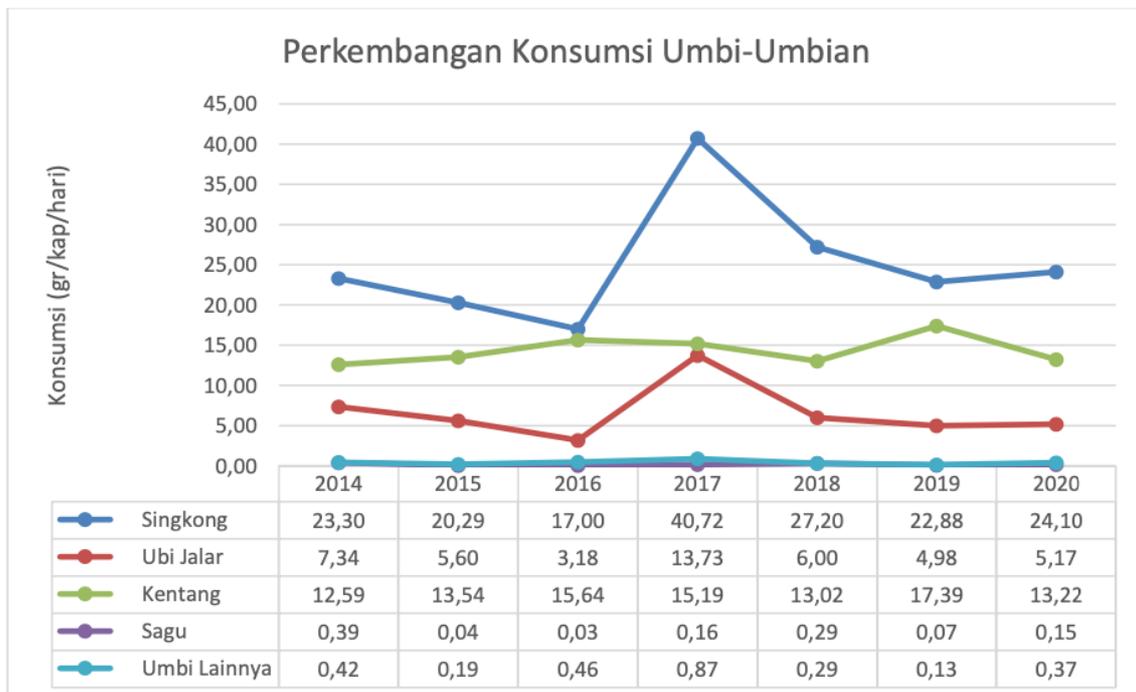
*AKE: 2,000 kkal/kap/hari

** AKE: 2,150 kkal/kap/hari

Selanjutnya disampaikan perkembangan konsumsi pangan setiap kelompok/jenis pangan. Kelompok pangan padi-padian terdiri dari beras, jagung, dan terigu. Konsumsi beras selama 7 tahun terakhir menunjukkan penurunan sebesar 2,1%. Konsumsi beras pada tahun 2020 sebesar 236,48 gram/kapita/hari. Jumlah ini yang paling rendah sejak tahun 2014. Di lain sisi, terjadi peningkatan konsumsi terigu sebesar 11,3%. Konsumsi terigu pada tahun 2020 sebesar 56,37 gram/kapita/hari. Konsumsi jagung menunjukkan peningkatan sebesar 77% selama 7 tahun namun jumlahnya masih sangat sedikit. Dengan demikian, diketahui bahwa pola konsumsi pangan sumber karbohidrat di Kabupaten Bandung bergeser ke arah konsumsi tepung terigu dan olahannya.

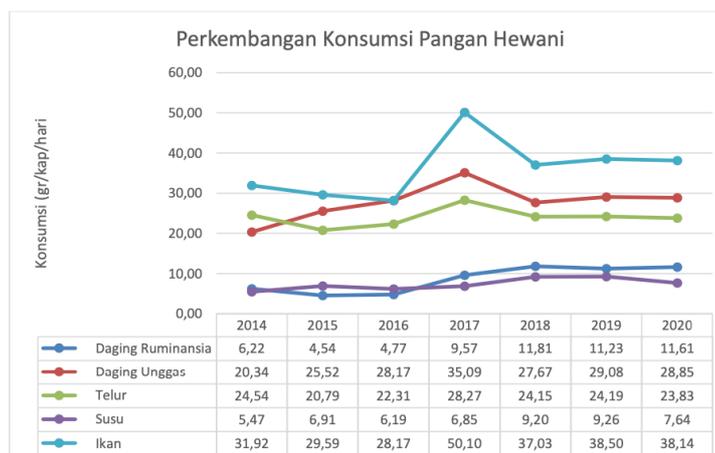


Gambar 2. Perkembangan Konsumsi Padi-Padian Tahun 2014-2020



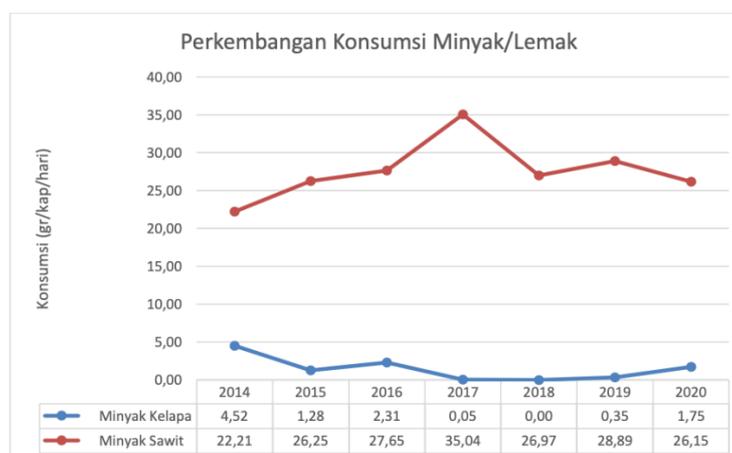
Gambar 3. Perkembangan Konsumsi Umbi-Umbian Tahun 2014-2020

Konsumsi umbi-umbian masih belum cukup yaitu baru 43% dari anjuran ideal. Meskipun demikian, trendnya menunjukkan konsumsi yang meningkat pada setiap jenis umbi-umbian. Rata-rata selama 7 tahun menunjukkan peningkatan konsumsi singkong sebesar 11%, rata-rata peningkatan konsumsi ubi jalar sebesar 32,6%, rata-rata peningkatan konsumsi kentang 2,6%, rata-rata peningkatan konsumsi sagu meningkat sebesar 63% dan umbi lainnya rata-rata meningkat sebesar 39,4%. Konsumsi umbi-umbian tertinggi pada tahun 2020 adalah singkong (24,10 gr/kapita/hari) dan kentang (13,22 gr/kapita/hari).



Gambar 4. Perkembangan Konsumsi Pangan Hewani Tahun 2014-2020

Konsumsi pangan hewani hampir mencapai anjuran ideal. Secara rata-rata selama 7 tahun terakhir, semua jenis pangan hewani menunjukkan peningkatan yang positif. Namun, konsumsi pangan hewani pada tahun 2020 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diperkirakan karena dampak Pandemi Covid-19 yang menurunkan daya beli penduduk termasuk anggaran untuk membeli protein hewani. Peningkatan konsumsi pangan hewani tertinggi selama 7 tahun adalah pada daging ruminansia (16,7%). Dari segi jumlah, konsumsi pangan hewani tertinggi pada tahun 2020 adalah ikan (38,14 gr/kap/hari), diikuti oleh daging unggas (28,85 gr/kapita/hari), telur (23,83 gr/kapita/hari), daging ruminansia (11,61 gr/kapita/hari) dan susu (7,64 gr/kapita/hari). Jenis ikan yang paling banyak dikonsumsi penduduk adalah ikan mas/nila, ikan mujair, dan ikan tongkol.

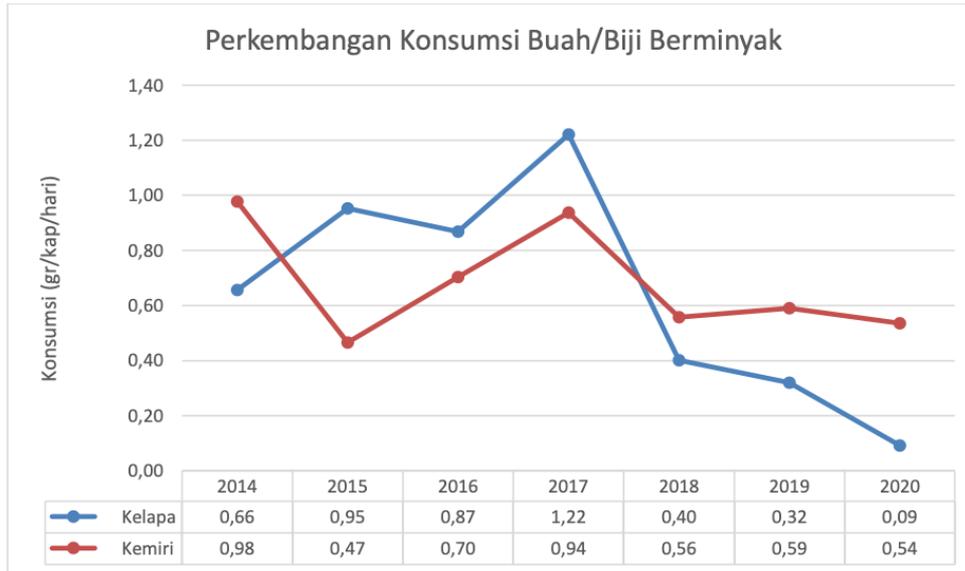


Gambar 5. Perkembangan Konsumsi Minyak dan Lemak Tahun 2014-2020

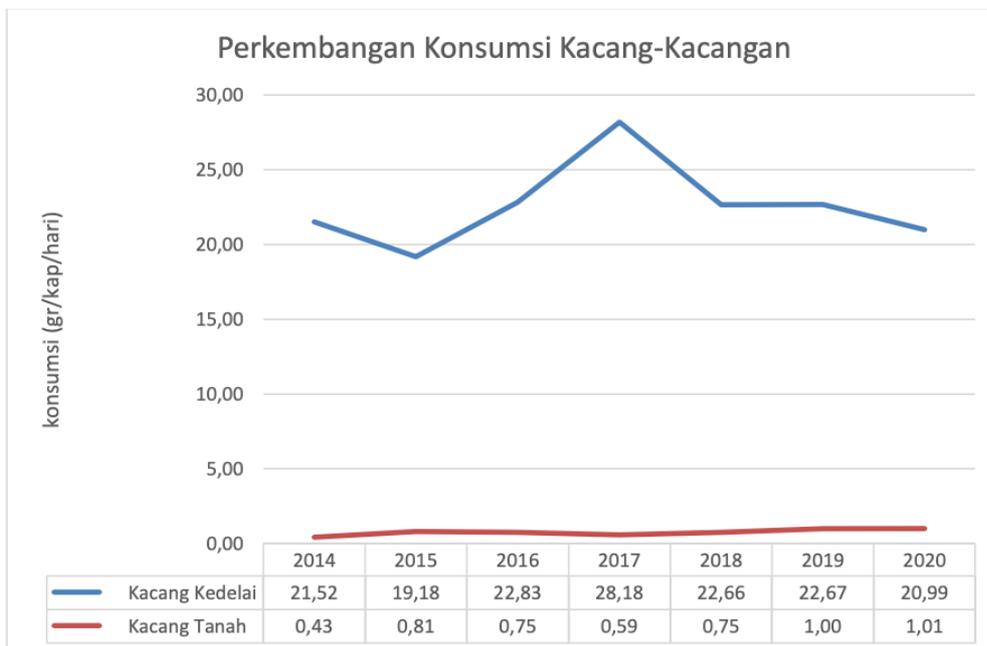
Konsumsi minyak/lemak cenderung berlebih dan trendnya menunjukkan peningkatan selama 7 tahun terakhir namun cenderung turun pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Rata-rata peningkatan konsumsi minyak sawit adalah sebesar 4,1% sedangkan minyak kelapa 35,1% selama tahun 2014-2020. Sumber utama minyak/lemak di Kabupaten Bandung adalah minyak sawit (26,15 gr/kapita/hari) diikuti dengan minyak kelapa (1,75 gr/kapita/hari). Hal ini menunjukkan penduduk sangat menyukai makanan gorengan/lauk-pauk yang digoreng. Konsumsi makanan gorengan pada tahun 2020 sebesar 25,6 gram/kapita/hari. Dengan demikian, pola konsumsi pangan minyak/lemak adalah minyak sawit (91%) dan minyak kelapa (6%).



Konsumsi buah/biji berminyak masih belum sesuai anjuran ideal dan justru cenderung menurun selama 7 tahun terakhir. Konsumsi kelapa turun -13,6% sedangkan konsumsi kemiri turun sebesar -2% selama 7 tahun. Konsumsi buah/biji berminyak meliputi kemiri (0,59 gram/kapita/hari) dan kelapa (0,09 gr/kapita/hari). Penduduk perlu meningkatkan konsumsi buah/biji berminyak dalam menu hariannya.

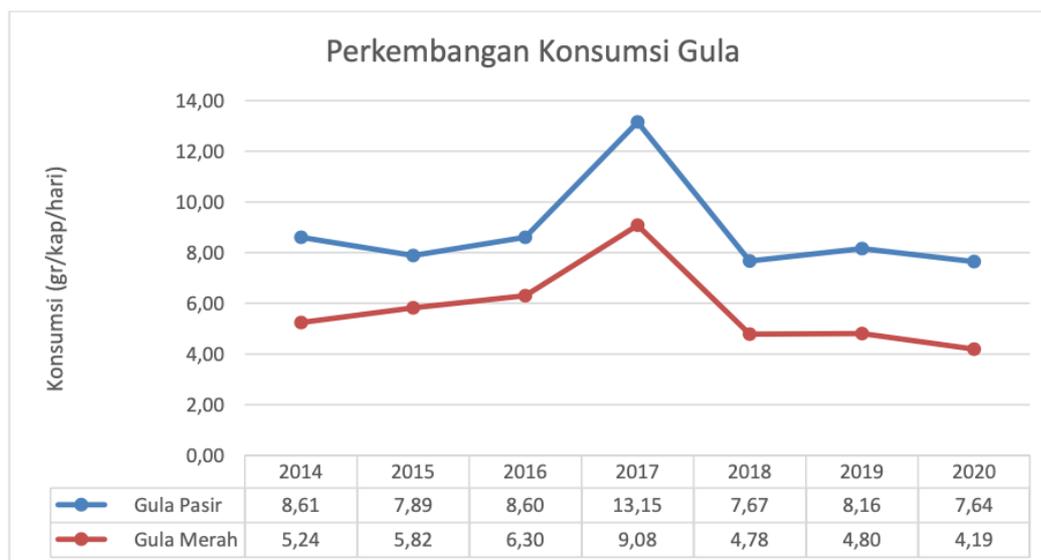


Gambar 6. Perkembangan Konsumsi Buah/Biji Berminyak Tahun 2014-2020



Gambar 7. Perkembangan Konsumsi Kacang-Kacangan Tahun 2014-2020

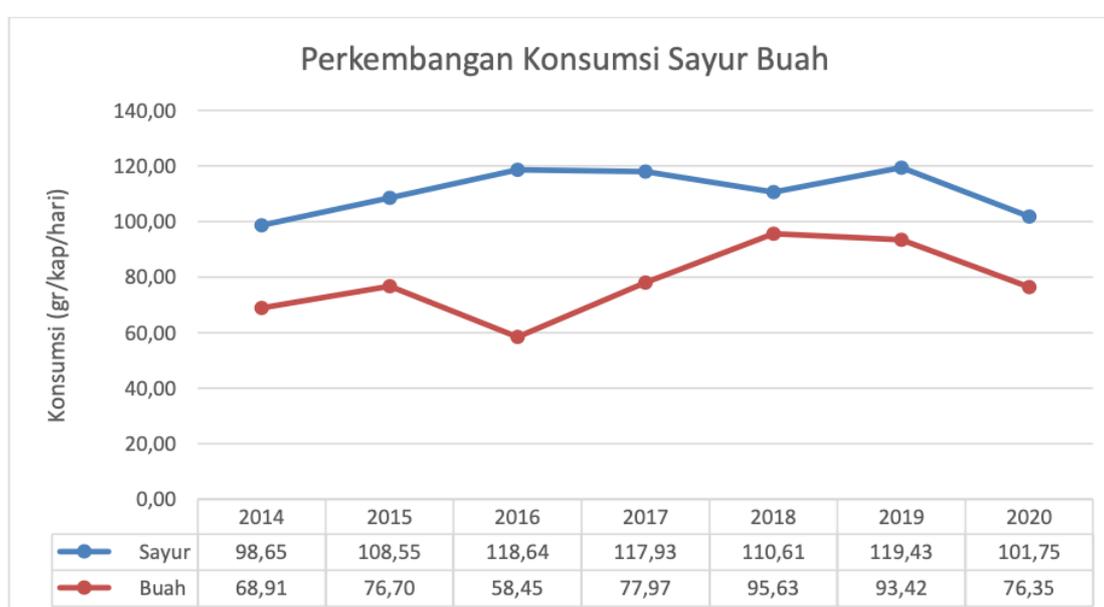
Konsumsi kacang-kacangan belum sesuai dengan anjuran ideal, namun trendnya menunjukkan peningkatan selama 7 tahun terakhir. Konsumsi kacang tanah meningkat sebesar 20,2% sedangkan konsumsi kacang kedelai meningkat sebesar 0,8% selama periode 2014- 2020. Konsumsi kacang-kacangan paling tinggi adalah kacang kedelai (20,99 gr/kapita/hari), terutama dalam bentuk olahan tahu dan tempe.



Gambar 8. Perkembangan Konsumsi Gula Tahun 2014-2020

Konsumsi gula penduduk Kabupaten Bandung belum ideal dan memiliki trend yang cenderung meningkat selama 7 tahun terakhir. Konsumsi gula pasir meningkat sebesar 2% sedangkan gula merah hanya meningkat sebesar 0,6% selama tahun 2014-2020. Konsumsi gula pasir pada tahun 2020 sebesar 7,64 gr/kapita/hari dan gula merah sebesar 4,19%.

Konsumsi sayur dan buah juga perlu ditingkatkan. Sayur dan buah sangat penting untuk menjaga kesehatan dan metabolisme tubuh yang normal karena merupakan sumber vitamin dan mineral. Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah produsen sayur dan buah di Jawa Barat. Hal ini merupakan potensi yang baik untuk meningkatkan konsumsi penduduk. Konsumsi sayur meningkat rata-rata sebesar 0,9% sedangkan konsumsi buah meningkat rata-rata sebesar 3,8% selama 7 tahun terakhir. Namun, konsumsi sayur dan buah pada tahun 2020 cenderung menurun dibandingkan dengan tahun 2019. Konsumsi sayuran lebih tinggi daripada buah-buahan yaitu 101,75 gram/kapita/hari dan 76,35 gr/kapita/hari berturut-turut.



Gambar 9. Perkembangan Konsumsi Sayur Buah Tahun 2014-2020



Evaluasi Pencapaian Skor PPH

Skor PPH Konsumsi Pangan merupakan salah satu indikator kinerja untuk mencapai Misi Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Bedaya Saing, Tujuan Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah dengan Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan pada dokumen RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2016-2021. Adapun sasaran capaian skor PPH pada tahun 2021 adalah 94 poin, sedangkan capaian tahun ini hanya 80,3 poin.

Tabel 3. Evaluasi Pencapaian Skor PPH Tahun 2021

Indikator Kinerja Skor PPH	2018	2019	2020	2021
Target RPJMD	86	89	92	94
Realisasi	84,6	83,6	83,3	80,3
Capaian	Tidak tercapai			

Target skor PPH Kabupaten Bandung berdasarkan RPJMD untuk tahun 2017- 2021 rata-rata meningkat sebesar 2,75 poin. Namun, faktanya skor PPH sejak tahun 2016-2020 rata-rata meningkat sebesar 0,39%. Target PPH konsumsi pun tidak tercapai setiap tahun, termasuk di tahun ini.

Untuk penyusunan target skor PPH pada periode RPJMD tahun 2021-2026 perlu memperhatikan trend skor PPH selama tahun 2014-2020. Selain itu diperlukan penajaman program kegiatan lintas sektoral yang terkait dengan penganekaragaman konsumsi pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan penduduk.

Analisis Kesesuaian Indikator dalam RPJMD Dan Renstra dengan Sistem Pangan

Urusan pangan menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung yang termuat dalam Misi kelima Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2021-2026. Misi kelima Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2021-2026 yaitu “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah dengan tujuan “Meningkatkan ketahanan pangan daerah” dan sasaran “Menurunkan masalah pangan daerah”, serta dengan indikator skor PPH konsumsi. Berdasarkan hasil evaluasi skor PPH konsumsi Kabupaten Bandung tahun 2021, target capaian sebesar 92 poin, sedangkan realisasi sebesar 80,3 poin. Hal ini menandakan adanya gap atau ketimpangan sebesar 11,7 poin di tahun 2021. Oleh karena itu, percepatan peningkatan kualitas konsumsi pangan menjadi fokus penting yang harus ditangani bersama. Konvergensi program dan kegiatan antar OPD menjadi penting agar percepatan peningkatan kualitas konsumsi pangan Kabupaten Bandung terwujud serta target skor PPH konsumsi dapat tercapai.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 110 dinyatakan penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD. Pasal 180 juga disebutkan Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Atas dasar inilah perlu dilakukan penyusunan indikator khususnya indikator peningkatan kualitas konsumsi pangan, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap percepatan target peningkatan kualitas konsumsi pangan di Kabupaten Bandung untuk lima tahun kedepan.



Analisis Kesesuaian Indikator RPJMD dengan Sistem Pangan

Indikator dalam RPJMD yang dianalisis adalah indikator makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah (aspek kesejahteraan dan aspek pelayanan umum). Berdasarkan hasil analisis, indikator dalam RPJMD secara umum sudah sesuai dengan sistem pangan mulai dari sistem inti, elemen sosial dan elemen alam. Sistem inti terdiri atas produksi, agregasi/proses, distribusi serta konsumsi. Indikator RPJMD yang sesuai dengan lingkup produksi meliputi ketersediaan pangan utama, peningkatan produksi perikanan budidaya/ikan tangkap/olahan perikanan, peningkatan produksi komoditas sektor pertanian, peningkatan produksi ternak dan unggas, peningkatan status kesehatan hewan ternak dan kualitas kasmavet produk asal hewan. Lingkup agregasi dan proses terdiri atas indikator cadangan pangan/lumbung pangan, serta pemeriksaan produksi produk makanan/minuman industri rumah tangga. Indikator yang sesuai dengan lingkup distribusi meliputi distribusi perdagangan berkualitas/terkelola, ruas jalan termitigasi risiko kemacetan, keamanan pangan segar, serta pemeriksaan (post market) produksi produk makanan/minuman/industri rumah tangga. Adapun indikator yang sudah sesuai dengan lingkup konsumsi adalah rasio konsumsi beras, sayur dan buah terhadap total konsumsi ideal. Indikator dalam RPJMD tahun 2021-2026 Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan seluruh elemen sosial sistem pangan. Indikator dalam RPJMD tahun 2021-2026 juga sudah sesuai dengan kelima elemen alam sistem pangan. Persentase indikator program subsistem/subelemen pada RPJMD dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4. Persentase indikator program pada masing-masing elemen/sistem sesuai sistem pangan

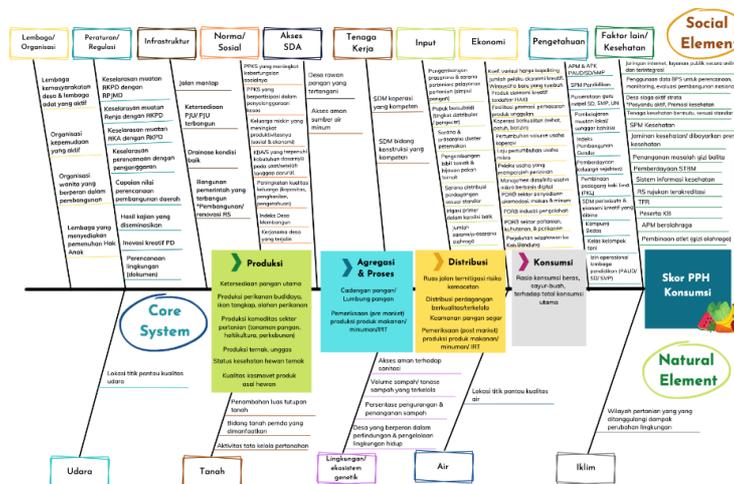
Subsistem/elemen	Sistem/Elemen	Persentase persistem/elemen	Persentase pertotal sistem pangan
Produksi	Sistem Inti	46,15	6,31
Agregasi & Proses	Sistem Inti	15,38	2,10
Distribusi	Sistem Inti	30,77	4,21
Konsumsi	Sistem Inti	7,69	1,05
Lembaga/organisasi	Elemen sosial	5,56	4,21
Perturan/regulasi	Elemen sosial	11,11	8,42
Infrastruktur	Elemen sosial	5,56	4,21
Norma/sosial	Elemen sosial	9,72	7,36
Akses SDA	Elemen sosial	2,78	2,10
Tenaga kerja	Elemen sosial	2,78	2,10
Input	Elemen sosial	9,72	7,37
Ekonomi	Elemen sosial	18,06	13,68
Pengetahuan	Elemen sosial	15,27	11,58



Subsistem/elemen	Sistem/Elemen	Persentase persistem/elemen	Persentase pertotal sistem pangan
Faktor lain/kesehatan	Elemen sosial	19,44	14,74
Udara	Elemen alam	10	1,05
Tanah	Elemen alam	30	3,16
Lingkungan/ ekosistem genetik	Elemen alam	40	4,21
Air	Elemen alam	10	1,05
Iklim	Elemen alam	10	1,05

Berdasarkan jumlah indikator program pada sistem inti, proporsi program lingkup produksi lebih dominan (46%) dibandingkan dengan lingkup distribusi (30,77%), agregasi dan proses (15,38%), maupun konsumsi (7,69%). Program untuk mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan seharusnya tidak hanya berbasis pada supply (produksi), tetapi juga berbasis pada demand atau perubahan perilaku konsumsi yang dikawal oleh lintas OPD terkait.

Mayoritas indikator program pada elemen sosial yang mendukung sistem inti terletak pada sub-elemen kesehatan atau faktor lain (19,44%), sisanya meliputi sub- elemen ekonomi (18,05%), pengetahuan (15,27%), peraturan/regulasi (11,11%), norma/sosial (9,72%), input (9,72%), lembaga/organisasi (5,56%), infrastruktur (5,56%), akses SDA (2,78%), dan tenaga kerja (2,78%). Adapun mayoritas indikator program pada elemen alam yang mendukung sistem inti adalah sub-elemen lingkungan/ekosistem genetik (40%), sisanya terletak pada sub-elemen tanah (30%), udara (10%), air (10%), dan iklim (10%). Berdasarkan Tabel 7 juga dapat diketahui bahwa mayoritas persentase indikator program terhadap total sistem pangan terletak pada subelemen faktor lain/kesehatan (14,74%) dan ekonomi (13,68%), sedangkan yang terendah adalah subsistem konsumsi, serta sub elemen udara, air dan iklim dengan masing-masing sebesar 1,05%. Indikator dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 yang mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan disajikan pada Gambar dibawah ini.



Gambar 10. Indikator dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 yang mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan

E. PENUTUP

Kesimpulan

Indikator dalam RPJMD berupa indikator makro, indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah (aspek kesejahteraan dan aspek pelayanan umum) secara umum sudah sesuai dengan sistem pangan dalam rangka mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan penduduk. Mayoritas persentase indikator program pada RPJMD terhadap total sistem pangan terletak pada subelemen faktor lain/kesehatan (14,74%) dan ekonomi (13,68%), sedangkan yang terendah adalah subsistem konsumsi, serta sub elemen udara, air dan iklim dengan masing-masing sebesar 1,05%. Mayoritas indikator program pada RPJMD yang sesuai dengan sistem inti terletak pada lingkup produksi (46%), sedangkan sisanya terdapat pada lingkup distribusi (30,77%), agregasi dan proses (15,38%), dan konsumsi (7,69%). Mayoritas indikator program pada elemen sosial terletak pada sub-elemen kesehatan atau faktor lain (19,44%), sedangkan sisanya terletak pada sub-elemen ekonomi (18,05%), pengetahuan (15,27%), peraturan/regulasi (11,11%), norma/sosial (9,72%), input (9,72%), lembaga/organisasi (5,56%), infrastruktur (5,56%), akses SDA (2,78%), dan tenaga kerja (2,78%). Adapun mayoritas indikator program pada elemen alam adalah sub-elemen lingkungan/ekosistem genetik (40%), sisanya sub-elemen tanah (30%), udara (10%), air (10%), dan iklim (10%).

Rekomendasi

Urusan pangan bukan hanya tugas, fungsi dan kewajiban Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan saja, akan tetapi memerlukan dukungan dari seluruh dinas terkait. Dukungan dalam bentuk program, kegiatan, maupun subkegiatan untuk perbaikan kualitas konsumsi pangan diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan Renja dengan memperhatikan impact pembangunan pangan yaitu peningkatan skor PPH konsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2020. *Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan. 2021. *Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan. 2021. *Renstra Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026*
- Food and Agricultural Organization. 2018. *Sustainable Food System; Concept and Framework*.
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga. 2021. *Rencana Strategis Dispora Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026*.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. 2021. *Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026*.
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. 2021. *Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026*.
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2021. *Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026*.
- Dinas Kesehatan. 2021. *Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026*.



- Dinas Lingkungan Hidup. 2021. *Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026*.
- Dinas Pertanian. 2021. *Rencana Strategis Dinas Pertanian, Kabupaten Bandung Tahun 2021-2016*.
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021. *Renstra DP2KBP3A Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026*.
- Dinas Pariwisata dan Budaya. 2021. *Ranwal Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Budaya, Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026*.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. 2021. *Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kabupaten Bandung tahun 2021-2026*.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2021. *Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026*.
- Dinas Pendidikan. 2021. *Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026*.
- Dinas Sosial. 2021. *Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Sosial, Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026*.
- Republik Indonesia. 2004. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Kemamanan, Mutu, dan Gizi Pangan*
- Republik Indonesia. 2004. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi*.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*
- Republik Indonesia. 2012. *Undang Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan*
- Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi*
- Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia.. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia*.
- Republik Indonesia. 2020. *Keputusan Menteri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2020. *Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi 2020-2024*.
- Republik Indonesia. 2020. *Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2021-2024*.